

TINGKAT AKURASI PENERIMA PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL PADA RUMAH TANGGA PERTANIAN DI INDONESIA

(Accuracy Rate of Social Protection Program Beneficiaries in Agriculture Households in Indonesia)

Ema Tusianti* dan Tiodora Hadumaon Siagian**

*Badan Pusat Statistik

Jl. Dr. Sutomo No 6-8 Jakarta

Email: tusianti@bps.go.id

**Politeknik Statistika STISI

Jl. Otto Iskandardinata No.64C, Jakarta Timur

Email: theo@stis.ac.id

Naskah diterima: 15 September 2022

Naskah direvisi: 4 Desember 2022

Naskah diterbitkan: 31 Desember 2023

Abstract

The majority of poor households in Indonesia depend on agriculture for their livelihoods. Poverty alleviation can be focused on agricultural households (RTPs). This study aims to analyze the accuracy of social protection program beneficiaries for poor RTPs based on 2021 National Socio-Economic Survey. Poverty is measured by the multidimensional approach. The accuracy is measured by distribution of beneficiaries and counted by a confusion matrix. The results found that the percentage of severely poor RTPs receiving Prosperous Family Cards (KKS), Family Hope Program (PKH), or Non-Cash Food Assistance (BPNT), routine and non-routine local government is only less than 30 percent, respectively. Surprisingly, it is also found that many non-poor RTPs received the KKS, PKH, BPNT, routine and non-routine local government aid, by 15 percent, 18 percent, 23 percent, 7 percent, and 16 percent respectively. The accuracy rate of social protection program beneficiaries is varied, but the lowest rate is the BPNT beneficiaries, namely 76 percent. The accuracy rate of social protection program distribution tended to be lower for RTP than the total households, indicating a case of inaccuracy distribution in rural areas.

Keywords: agricultural households, social protection program, multidimensional poverty, accuracy rate

Abstrak

Mayoritas rumah tangga miskin di Indonesia menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian. Pengentasan kemiskinan utamanya dapat difokuskan pada Rumah Tangga Pertanian (RTP). Penelitian ini bertujuan menganalisis ketepatan penerima program perlindungan sosial pada RTP berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional 2021. Dalam penelitian ini kemiskinan diukur dengan pendekatan multidimensi. Ketepatan pemberian bantuan dilihat dari sebaran data penerima perlindungan sosial dan dihitung dari matriks konfusi. Hasil penelitian menemukan bahwa persentase RTP sangat miskin yang memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), menerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH), menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bantuan rutin dan tidak rutin pemerintah daerah (pemda), masing-masing kurang dari 30 persen. Temuan mengejutkan adalah banyak RTP tidak miskin menerima program KKS, PKH, BPNT, bantuan rutin, dan bantuan non rutin pemda, masing-masing sebesar 15 persen, 18 persen, 23 persen, 7 persen dan 16 persen. Tingkat akurasi penerima perlindungan sosial bervariasi, namun paling rendah adalah pada distribusi BPNT, yaitu sebesar 76 persen. Tingkat akurasi penerima perlindungan sosial pada RTP lebih rendah dari penerima bantuan rumah tangga keseluruhan. Dengan lebih banyaknya RTP yang tinggal di pedesaan, hal tersebut memperkuat dugaan ketidakakuratan penerima perlindungan sosial di pedesaan.

Kata kunci: rumah tangga pertanian, bansos, kemiskinan multidimensi, tingkat akurasi

PENDAHULUAN

Sektor pertanian memegang peranan sangat penting bagi perekonomian dan masyarakat Indonesia. Sektor pertanian menjadi penopang perekonomian Indonesia di masa pandemi Covid-19 (BPS, 2022a), namun pelaku usaha di sektor ini masih belum dapat dikatakan sejahtera. Lebih dari separuh rumahtangga miskin adalah rumah tangga pertanian (BPS, 2022b). Bahkan persentase rumah tangga miskin sektor pertanian justru mengalami peningkatan pada tahun 2021 (BPS, 2022b). Pada tahun 2020, berdasarkan penghitungan tingkat kemiskinan moneter, persentase rumah tangga miskin dengan sumber penghasilan utama pertanian ada sebanyak 46,30 persen, setahun berikutnya naik menjadi 51,33 persen dari keseluruhan rumah tangga di Indonesia. Oleh karena itu pengentasan kemiskinan di Indonesia dapat difokuskan pada rumah tangga pertanian (RTP).

Pemerintah telah menyediakan berbagai program perlindungan sosial dalam upaya pengentasan kemiskinan. Menurut Kementerian Sosial (Kemensos), terdapat dua jenis bantuan reguler, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako (Kemensos, 22 September 2021). Sementara itu, Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) merupakan media penyaluran berbagai bantuan dari pemerintah, termasuk PKH dan BPNT (BPS, 2021). Selain dari pemerintah pusat, perlindungan sosial juga diberikan oleh pemerintah daerah, baik bersifat rutin maupun non rutin (BPS, 2021).

DOI: <http://dx.doi.org/10.22212/jekp.v14i2.3367>

Pusat Analisis Keparlemenan-Badan Keahlian DPR RI, Setjen DPR RI

Berbagai program perlindungan sosial yang telah disebutkan di atas, disinyalir tidak tepat sasaran, sebagaimana temuan Anggleni (2018); Arifin (2020); Masnan & Nashir, (2020); Sofianto (2020); Beni & Manggu (2020); Kurniawan (2020); dan Aisyah et al. (2021). Penelitian-penelitian tersebut tidak spesifik pada RTP dan hanya mengkaji tingkat wilayah kelurahan/desa atau kecamatan tertentu, bukan pada tingkat nasional. Kajian tersebut juga mayoritas menggunakan pendekatan kualitatif. Kajian lainnya seperti BPS (2022b) menggunakan pendekatan kuantitatif namun tidak spesifik mengulas RTP dan menggunakan pengeluaran rumah tangga sebagai ukuran kemiskinan.

Kemensos menggunakan beberapa kriteria miskin sebagai persyaratan penerima perlindungan sosial dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/Huk/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu. Kriteria tersebut lebih mendekati konsep kemiskinan multidimensi. Menurut Aidha et al. (2020) bahwa seseorang yang miskin bukan hanya tidak memiliki uang tetapi juga memiliki kehidupan yang kurang layak, seperti gizi buruk, tempat tinggal yang kurang layak, tidak sehat, dan lain-lain. Oleh sebab itu, mengukur kemiskinan dianggap lebih tepat jika menggunakan pendekatan multidimensi dibandingkan dengan pendekatan unidimensi. Pengukuran kemiskinan dengan menggunakan variabel pengeluaran merupakan salah satu pendekatan unidimensi.

Beberapa penelitian telah mengkaji kemiskinan multidimensi dan mengaitkannya dengan bantuan atau perlindungan, diantaranya Khaliq & Uspri (2017) namun mereka tidak terfokus pada kondisi terkini dan pada RTP. Sementara itu, penelitian Sumargo & Simanjuntak (2019) dan Pardede (2021) menggunakan kemiskinan multidimensi untuk mengaitkannya dengan kebijakan pada aspek yang lebih luas, seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Kaitan antara pemberian program perlindungan sosial dan kemiskinan multidimensi perlu dikaji untuk mengevaluasi apakah penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan sudah tepat sasaran atau belum. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat ketepatan penerima program perlindungan sosial dan tingkat kemiskinan multidimensi pada RTP yang terkategori sangat miskin, miskin dan tidak miskin. Dengan diketahuinya sebaran rumah tangga penerima perlindungan sosial pada berbagai tingkat kemiskinan multidimensi serta besaran akurasi pemberian perlindungan sosial, maka ketepatan pemberian perlindungan sosial terhadap rumah tangga miskin pertanian dapat terukur. Dengan demikian, kajian ini dapat menjadi bukti empiris dalam penyusunan kebijakan berbasis data bagi pihak yang berkepentingan, seperti Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Kementerian Sosial.

METODE

Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2021 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Survei ini menghasilkan berbagai indikator mencakup kesehatan, ketenagakerjaan, pendidikan, perumahan, dan perlindungan sosial. Dalam kajian ini, data yang digunakan berupa data mentah dengan jumlah sampel sebanyak 340.032 rumah tangga, dengan rincian 140.892 RTP dan 199.140 non RTP. RTP yang dimaksud dalam penelitian ini adalah rumah tangga dengan kepala rumah tangga yang bekerja pada lapangan usaha utama sektor pertanian.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu menyajikan data dengan visualisasi tabel dan grafik yang selanjutnya dinarasikan. Visualisasi tersebut ditujukan untuk menggambarkan sebaran RTP menurut kategori kemiskinan multidimensi. Sementara itu, untuk mengkategorikan suatu rumah tangga miskin multidimensi, digunakan metode Alkire-Foster dengan pendekatan terdeprivasi (Alkire et al., 2014). Penelitian dengan pendekatan kemiskinan multidimensi telah banyak diteliti, misalnya Setyani & Sugiarto, (2021), Pardede (2021), Gopal et al. (2021), Fuady et al. (2021), Sumargo & Simanjuntak (2019), Rastantra & Mulia (2019), dan Aidha et al. (2020).

Penghitungan kemiskinan multidimensi dalam penelitian ini menggunakan tiga dimensi, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup, yang mengikuti Budiantoro et al. (2013), Alkire & Jahan (2018), Sumargo & Simanjuntak (2019), Aidha et al. (2020), dan Pardede (2021). Selain itu, penelitian ini menggunakan sembilan variabel sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1. Variabel yang terpilih disesuaikan dengan ketersediaan data, unit analisis, serta keseimbangan jumlah indikator pada setiap dimensi. Adapun bobot yang digunakan pada setiap indikator adalah *equal weighting*, demikian halnya dengan bobot untuk indikator dalam satu dimensi. Pembobotan ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Aidha et al. (2020).

Untuk mengkategorikan tingkatan rumah tangga miskin multidimensi diperoleh dari skor deprivasi (Skor RT) setiap rumah tangga dengan formula:

$$Skor RT_i = \sum_{j=1}^9 I_{ji} \times W_j \dots\dots\dots (1)$$

di mana:

I : indikator

W : bobot

I : rumah tangga ke 1,...,n

N : jumlah rumah tangga

J : indikator ke 1,...,9

Selanjutnya, untuk mengkategorikan tingkat kemiskinan, kajian ini menggunakan *cut off point* sebagai berikut: (1) Tidak miskin multidimensi, yaitu rumah tangga dengan skor deprivasi < 0,333, (2) Miskin multidimensi, yaitu rumah tangga dengan skor deprivasi di antara 0,333-0,499, dan (3) Sangat miskin multidimensi, yaitu rumah tangga dengan skor deprivasi ≥ 0,500 mengikuti Aidha et al. (2020). Sementara itu, Alkire & Foster (2007) hanya menggunakan dua kategori saja, miskin (skor ≥ 0,333), dan tidak miskin (skor < 0,333). Kajian ini menggunakan keduanya. Ketika mengkategorikan RTP hanya miskin dan tidak miskin, maka dilakukan penggabungan antara RTP kategori miskin dan sangat miskin.

Tabel 1. Dimensi, Indikator, Kriteria Deprivasi, dan Bobot dalam Penentuan Tingkat Kemiskinan Multidimensi

Dimensi	Indikator	Kriteria Deprivasi	Bobot
Kesehatan	Sanitasi	Dikatakan terdeprivasi jika tidak memiliki fasilitas tempat buang air besar pribadi, digunakan bersama anggota rumah tangga (ART) tertentu atau komunal dan jenis klosetnya bukan leher angsa (Aidha et al., 2020; Alkire & Jahan (2018)).	1/9
	Sumber air minum utama	Dikatakan terdeprivasi jika air minumannya bukan berasal dari leding meteran dan leding eceran serta tidak menggunakan air minum dari sumur bor/pompa, sumur/mata air terlindungi yang berjarak minimal 10-meter dari tempat penampungan limbah (Aidha et al., 2020).	1/9
	Akses terhadap fasilitas kesehatan	Dikatakan terdeprivasi apabila dalam rumah tangga terdapat anggota rumah tangga yang mengalami keluhan kesehatan yang mengganggu kegiatan sehari-hari serta tidak melakukan pengobatan di fasilitas kesehatan dikarenakan tidak mempunyai biaya berobat, atau tidak ada biaya transportasi, atau tidak ada sarana transportasi (Adopsi dari Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013).	1/9
Pendidikan	Pendidikan kepala rumah tangga (KRT)	Dikatakan terdeprivasi apabila KRT berpendidikan SD atau tidak sekolah (BPS, 2005 dalam Isdijoso et al., 2016).	1/9
	Akses terhadap pendidikan prasekolah	Dikatakan terdeprivasi apabila ada anggota rumah tangga berusia 3-6 tahun yang tidak memiliki akses ke pendidikan pra-sekolah (Aidha et al., 2020).	1/9
	Keberlanjutan sekolah	Dikatakan terdeprivasi apabila mereka yang berada pada usia sekolah dasar dan menengah (7-18 tahun) memiliki partisipasi sekolah tidak/belum pernah bersekolah dan tidak bersekolah lagi (Aidha et al., 2020; Budiantoro et al., 2013).	1/9
Standar Hidup	Bahan bakar utama	Dikatakan terdeprivasi apabila tidak menggunakan listrik dan gas untuk memasak (Aidha et al., 2020; Alkire & Jahan, 2018).	1/9
	Sumber penerangan	Dikatakan terdeprivasi apabila menggunakan listrik bukan dari PLN (Aidha et al., 2020; Budiantoro et al., 2013).	1/9
	Kondisi atap, dinding, dan lantai rumah	Dikatakan terdeprivasi apabila setidaknya memiliki kondisi tidak layak sebanyak dua dari tiga sub-indikator (atap, lantai, dan dinding). <ul style="list-style-type: none"> • Atap dikatakan tidak layak apabila terbuat selain dari beton, genteng, seng, dan asbes. • Dinding dikatakan tidak layak jika berbahan selain dari tembok, plesteran anyaman bambu/kawat, dan kayu. Lantai dikatakan tidak layak apabila berbahan selain dari marmer, keramik, granit, tegel, teraso, semen, dan kayu. Selanjutnya, luas lantai per kapita tidak layak apabila tidak memenuhi 7,2 meter persegi per kapita (Aidha et al., 2020; Alkire & Jahan, 2018).	1/9

Perlindungan sosial yang dikaji dalam penelitian ini adalah aksesibilitas RTP dalam berbagai program perlindungan sosial, diidentifikasi dari kepemilikan KKS, pengalaman menerima PKH, BNPT/Program Sembako,

serta bantuan rutin dan nonrutin dari pemerintah daerah pada periode Maret 2020-Maret 2021. Khusus untuk program PKH, penelitian ini hanya mengkaji RTP yang memiliki anggota rumah tangga yang sesuai dengan kriteria penerima PKH sebagaimana dalam Kemensos (2021), yaitu rumah tangga miskin yang memiliki lansia (penduduk lanjut usia), anak usia dini (0-6 tahun), anak usia SD, anak usia SMP/ sederajat, anak usia SMA/ sederajat, ibu hamil, serta penyandang disabilitas.

Apabila ditemukan proporsi yang besar pada penerima manfaat program perlindungan sosial di rumah tangga tidak miskin, maka dapat diartikan ada indikasi pemberian program bantuan yang tidak tepat sasaran. Selain dengan melihat proporsi, untuk menghitung tingkat akurasi aksesibilitas RTP terhadap perlindungan sosial, digunakan matriks konfusi regresi logistik biner. Dalam hal ini, variabel respon adalah aksesibilitas terhadap perlindungan sosial, sedangkan variabel prediktor adalah tingkat kemiskinan multidimensi. Matriks tersebut dapat digunakan apabila telah memenuhi persyaratan statistik, diantaranya Uji Hosmer and Lemeshow yang menguji apakah sebuah model regresi logistik yang digunakan sudah *fit*.

Matriks konfusi dapat mengukur tingkat akurasi bantuan sosial yang pernah digunakan Suhendra et al. (2020) untuk menganalisis ketepatan klasifikasi pemberian KKS di Kota Semarang. Matriks konfusi menghasilkan *Apparent Error Rate* (APER), yang menurut Johnson & Wichern (1992) dalam Suhendra et al. (2020) mampu melihat kesalahan klasifikasi.

Tabel 2. Matriks Konfusi

Hasil Observasi	Taksiran	
	y1	y2
y1	n11	n12
y2	n21	n22

Keterangan:

- y1 : kejadian sukses (mendapatkan perlindungan sosial)
- y2 : kejadian gagal (tidak mendapatkan perlindungan sosial)
- n11 : jumlah rumah tangga observasi yang mendapatkan perlindungan sosial dan diklasifikasikan sebagai penerima perlindungan sosial berdasarkan hasil taksiran regresi logistik dengan variabel penjelas tingkat kemiskinan multidimensi
- n21 : jumlah rumah tangga observasi yang tidak mendapatkan perlindungan sosial tetapi diklasifikasikan sebagai penerima perlindungan sosial berdasarkan hasil taksiran regresi logistik dengan variabel penjelas tingkat kemiskinan multidimensi
- n12 : jumlah rumah tangga observasi yang mendapatkan perlindungan sosial tetapi diklasifikasikan sebagai bukan penerima perlindungan sosial berdasarkan hasil taksiran regresi logistik dengan variabel penjelas tingkat kemiskinan multidimensi
- n22 : jumlah rumah tangga observasi yang tidak mendapatkan perlindungan sosial dan diklasifikasikan sebagai bukan penerima perlindungan sosial berdasarkan hasil taksiran regresi logistik dengan variabel penjelas tingkat kemiskinan multidimensi

Sumber: Suhendra et al., 2020.

APER dapat dihitung dengan rumus:

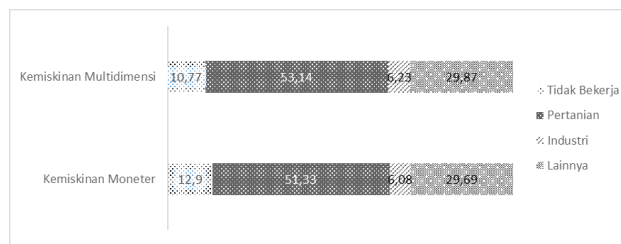
$$APER = \frac{n12 + n21}{n11 + n12 + n21 + n22} \dots\dots\dots (2)$$

$$Akurasi = 1 - APER \dots\dots\dots (3)$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebaran Rumah Tangga Miskin Multidimens

Pada Maret 2021, jumlah penduduk miskin di Indonesia tercatat sebesar 27,54 juta orang (10,14 persen), yang mayoritas tinggal di pedesaan (BPS, 2022b). Masyarakat pedesaan umumnya bekerja pada sektor pertanian. Hasil kajian ini selaras dengan kondisi tersebut. Rumah tangga berstatus miskin (miskin multidimensi dan sangat miskin multidimensi) lebih banyak terjadi pada RTP dibandingkan rumah tangga kategori lain. Hasil ini tidak jauh berbeda dengan penghitungan kemiskinan moneter, yang menggunakan pengeluaran per kapita dalam penentuan batas garis kemiskinan (BPS, 2022b). Persentase RTP yang miskin multidimensi dan persentase RTP yang miskin secara moneter sama-sama lebih dari 50 persen (Gambar 1).

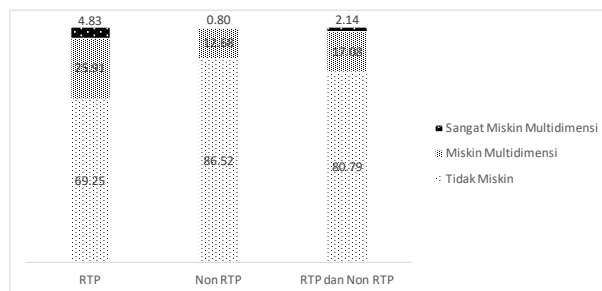


Keterangan: Miskin multidimensi jika skor 0,333 \geq

Sumber: Data mentah Susenas KOR Maret 2021 (diolah).

Gambar 1. Persentase Rumah Tangga Miskin Moneter dan Miskin Multidimensi Berdasarkan Lapangan Usaha KRT di Indonesia, 2021.

Apabila dilihat distribusi tingkat kemiskinan di masing-masing kelompok rumah tangga, mayoritas rumah tangga masuk ke dalam kategori tidak miskin. Namun, rumah tangga berstatus miskin (dan sangat miskin) lebih banyak dialami oleh RTP dibandingkan non RTP. Sebagai contoh, RTP sangat miskin multidimensi sebanyak 4,83 persen sedangkan persentase non RTP yang sangat miskin multidimensi tidak sampai 1 persen (Gambar 2). Hal ini menunjukkan bahwa kondisi RTP cukup memprihatinkan dibandingkan rumah tangga pada kategori lainnya sebagaimana dalam BPS (2022b) yang menunjukkan bahwa rumah tangga miskin mayoritas terjadi pada rumah tangga yang dikepalai oleh seseorang yang bekerja di sektor pertanian.



Sumber: Data Mentah Susenas KCR Maret 2021 (diolah)

Gambar 2. Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Tingkat Kemiskinan Multidimensi dan Kategori RumahTangga,2021

Di sisi lain, Gambar 2 juga menunjukkan bahwa jumlah RTP tidak miskin jauh lebih banyak dari RTP miskin dan sangat miskin. Persentase RTP tidak miskin ada sebanyak 69,25 persen. Sementara itu, RTP miskin dan sangat miskin berjumlah 25,91 persen dan 4,83 persen. Dengan demikian, apabila dihitung persentase RTP yang menerima perlindungan sosial di masing-masing kategori (tidak miskin, miskin, dan sangat miskin), kemudian ditemukan proporsi yang sama pada semua kategori maka jumlah RTP paling banyak menerima bantuan sosial secara absolut adalah RTP tidak miskin. Selanjutnya, apabila pemerintah menargetkan penerima bantuan sosial sebanyak 20 juta rumah tangga (atau sekitar 25 persen dari keseluruhan rumah tangga), maka sebaran penerima bantuan sosial

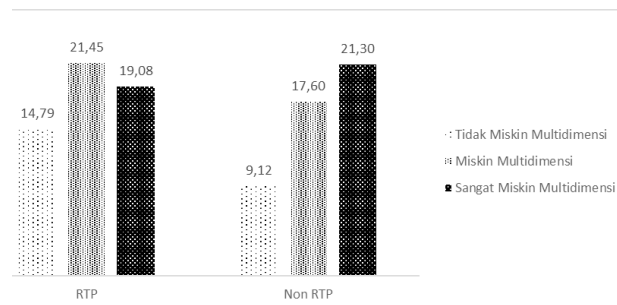
tersebut seharusnya mencakup seluruh (100 persen) rumah tangga sangat miskin yang berjumlah 4,83 persen, dan sisanya sebanyak 20 persen seharusnya didistribusikan kepada RTP miskin.

Rumah Tangga Miskin Multidimensi dan Perlindungan Sosial Program Kartu Keluarga Sejahtera

KKS merupakan kartu yang didistribusikan oleh pemerintah sebagai media untuk penyaluran bantuan sosial sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Pemegang KKS dapat menerima bantuan sosial dari pemerintah, baik PKH maupun BPNT (TNP2K, 2018). Pada masa pandemi Covid-19, KKS juga menjadi syarat wajib bagi penerima bansos yang terkait dengan bantuan pandemi Covid-19 (Widiyani, 2021).

Persyaratan penerima KKS adalah warga miskin. Oleh sebab itu, harapannya semakin tinggi status kemiskinan, semakin banyak rumah tangga yang memiliki KKS. Namun Gambar 3 belum menunjukkan kondisi yang diharapkan tersebut. Persentase RTP yang memiliki KKS masih ada yang tidak terkategori miskin. Bahkan, persentase RTP penerima KKS dengan kategori sangat miskin sangat sedikit.

Persentase RTP sangat miskin dan miskin yang memiliki KKS masing-masing baru sekitar 19 persen dan 21 persen. Hal ini menunjukkan bahwa program tersebut belum optimal. Berdasarkan kajian sebelumnya di beberapa wilayah, penyebab rendahnya penerima KKS di antaranya adalah sosialisasi yang kurang efektif sehingga masih banyak rumah tangga penerima bantuan yang belum terdaftar (Anggleni, 2018; Arifin, 2020; Masnan & Nashir, 2020). Hal ini sangat disayangkan, mengingat KKS cukup efektif dalam meningkatkan kesejahteraan rumah tangga miskin (Arifin, 2020).



Sumber: Data Mentah Susenas KOR Maret 2021 (diolah)

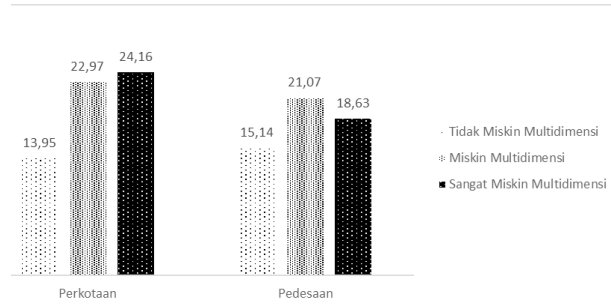
Gambar 3. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki KKS berdasarkan Kategori Rumah Tangga, dan Tingkat Kemiskinan Multidimensi, 2021

Hasil temuan lain dari penelitian ini adalah terdapat RTP tidak miskin yang menerima KKS, yaitu sebanyak 14,79 persen. Bahkan data BPS menggambarkan bahwa rumah tangga dengan kuintil pendapatan teratas (Q5 dan Q4) masih ada yang menerima KKS meskipun di bawah 10 persen (BPS, 2022b). Hal ini bisa jadi menggambarkan dua hal. *Pertama*, rumah tangga tersebut masih menjadi penerima KKS tetapi kondisinya sudah lebih sejahtera. Artinya, *updating* data penerima bantuan belum optimal. Hal tersebut diakui oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), bahwa banyak operator di lapangan yang tidak mengetahui aplikasi untuk proses perbaikan dan pengusulan baru Basis Data Terpadu (BDT) (Wisnubroto, 2021). *Kedua*, tingginya penerima KKS pada RTP tidak miskin menggambarkan indikasi ketidaktepatan penerima KKS.

Berdasarkan ukuran ketepatan pemberian KKS dengan menggunakan matriks konfusi, kajian ini menyimpulkan bahwa tingkat akurasi klasifikasi penerima KKS 87 persen pada keseluruhan rumah tangga. Sementara itu, tingkat akurasi klasifikasi penerima KKS pada RTP lebih rendah, yaitu 83 persen. Hal ini selaras dengan hasil kajian sebelumnya di beberapa wilayah. Suhendra et al. (2020) menyimpulkan bahwa tingkat ketepatan pemberian KKS sebesar 88-90 persen dan Hendri et al. (2022) sebesar 99 persen. Raydzika (2021) menyimpulkan korelasi kebijakan dan implementasi program KKS bersifat positif dan signifikan dengan nilai korelasi 0,5. Selanjutnya, secara kualitatif, Framita (2017) menyimpulkan bahwa pendistribusian kartu KKS sudah optimal. Sebagai catatan, berbagai penelitian tersebut tidak spesifik mengkaji RTP dan menggunakan metode yang berbeda dengan kajian ini, namun sama-sama menggambarkan bahwa meskipun akurasi sudah cukup baik, tetapi potensi tidak tepat sasaran tetap ada. Hal ini juga didukung temuan kajian ini yang menunjukkan adanya RTP tidak miskin yang mendapatkan KKS (Gambar 3).

Dilihat dari wilayah tempat tinggal, mayoritas tenaga kerja sektor pertanian tinggal di pedesaan (BPS, 2022c). Oleh sebab itu, RTP juga mayoritas berada di pedesaan. Namun demikian, dari hasil pengolahan data Susenas 2021 terdapat kecenderungan bahwa RTP penerima KKS di pedesaan lebih sedikit dibandingkan RTP di perkotaan

(Gambar 4). Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah perbandingan persentase RTP yang berstatus sangat miskin di perkotaan dan pedesaan. RTP sangat miskin penerima KKS di perkotaan (24,16 persen) lebih banyak dibandingkan RTP dengan status kemiskinan yang sama di pedesaan. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai hal, diantaranya keterbatasan informasi dan kurangnya sosialisasi mengenai prosedur perolehan bantuan sosial, kurangnya kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat melakukan pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di pedesaan, dan lain-lain.



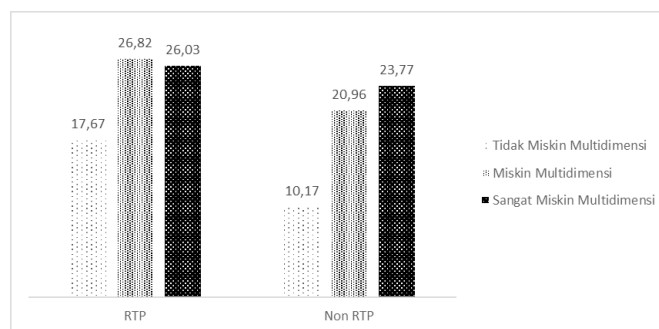
Sumber: Data Mentah Susenas KOR Maret 2021 (diolah)

Gambar 4. Persentase Rumah Tangga Pertanian yang Memiliki KKS berdasarkan Tempat Tinggal, dan Tingkat Kemiskinan Multidimesi, 2021

Program Keluarga Harapan

PKH merupakan program perlindungan sosial bagi rumah tangga miskin yang memiliki lansia (penduduk lanjut usia), dan atau anak usia dini (0-6 tahun), dan atau anak usia SD, dan atau anak usia SMP/ sederajat, dan atau anak usia SMA/ sederajat, dan atau ibu hamil, serta penyandang disabilitas (Kemensos, 2021). Pada tahun 2021, terdapat 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima PKH (BPS, 2022b). PKH memberikan dampak yang cukup signifikan dalam pengentasan kemiskinan sebagaimana hasil kajian Usman (2014), Utomo et al. (2014), Virgoreta (2014), Rizal (2018), Beni & Manggu (2020). PKH juga dapat meningkatkan konsumsi rumah tangga KPM (Kemensos, 2021).

Dari sudut pandang kesejahteraan sosial, menurut Suleman & Resnawaty (2017), PKH belum tepat disebut sebagai program pengentasan kemiskinan, tetapi lebih sesuai disebut sebagai perlindungan sosial karena ditujukan untuk menghindari masyarakat miskin dengan kategori tertentu untuk tidak semakin terjerumus ke dalam jurang kemiskinan, namun kajian ini menunjukkan bahwa 17,67 persen RTP penerima PKH justru berstatus tidak miskin (Gambar 5). Hal serupa juga sesuai dengan hasil kajian Sofianto (2020) di Jawa Tengah yang menemukan bahwa 21,54 persen penerima PKH bukan orang miskin, dan hanya 13,99 persen penerima PKH yang miskin, dan 26,21 persen sangat miskin.



Sumber: Data Mentah Susenas KOR Maret 2021 (diolah)

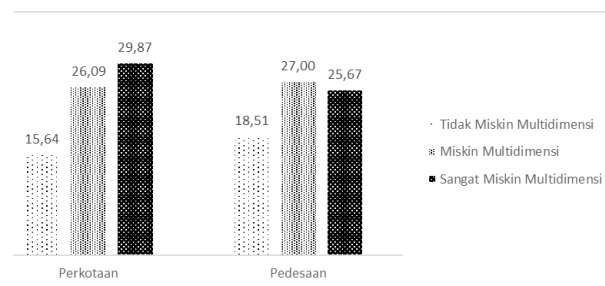
Gambar 5. Persentase Rumah Tangga yang Menerima Manfaat PKH berdasarkan Kategori Rumah Tangga, dan Tingkat Kemiskinan Multidimesi, 2021

RTP sangat miskin yang menerima PKH ada 26,03 persen (Gambar 5). Angka ini menunjukkan bahwa dari 100 RTP sangat miskin yang masuk kriteria penerima PKH, yaitu memiliki lansia (penduduk lanjut usia), anak usia dini (0-6 tahun), anak usia SD, anak usia SMP/ sederajat, anak usia SMA/ sederajat, ibu hamil, atau penyandang disabilitas, terdapat 26 rumah tangga yang menjadi penerima manfaat PKH. Dari sisi ketepatan klasifikasi, kajian ini menghasilkan tingkat akurasi penerima PKH pada rumah tangga keseluruhan 84 persen, sedangkan pada RTP hanya 78 persen. Angka ini lebih rendah dari akurasi penerima KKS.

Berbagai kajian menyimpulkan bahwa proses pemberian program PKH cukup optimal, seperti Roidah (2016), Sasmito & Nawangsari (2019), Purwanto et al. (2013). Namun, jika dilihat dari jumlah penduduk miskin, penerima manfaat PKH masih jauh dari yang seharusnya. Padahal hasil kajian ini, menunjukkan bahwa RTP yang sangat miskin jumlahnya kurang dari 5 persen dari keseluruhan rumah tangga di Indonesia (Gambar 2).

Selain itu, implementasi PKH belum sepenuhnya dilakukan sesuai prosedur, seperti hasil kajian (Kholif, 2014). Hal ini akan menjadi semakin berat bagi pengelola program PKH di pedesaan yang memiliki keterbatasan data dan informasi serta SDM pengelola data penerima bantuan yang masih terbatas. Seperti tergambar pada Gambar 6, persentase RTP tidak miskin yang menerima PKH di pedesaan lebih tinggi dari persentase RTP tidak miskin di perkotaan. Sebaliknya, RTP penerima PKH yang sangat miskin di pedesaan lebih sedikit dari RTP penerima PKH yang sangat miskin di perkotaan.

Pengelolaan data penerima PKH yang terbatas dan tidak merata di semua wilayah, sebaiknya segera diatasi untuk meningkatkan tingkat akurasi penerima bantuan. Proses penyediaan data registrasi yang akurat dan termutakhir sangat diperlukan. Jika data sudah tersedia secara mutakhir, maka selanjutnya diperlukan sistem informasi untuk mempermudah proses identifikasi penerima program dan sistem untuk mengambil keputusan. Proses tersebut dapat mengadopsi sistem yang telah ada misalnya, Sistem Informasi Program Keluarga Harapan yang disusun Fitriawati, et al. (2019). Selain itu, sistem pendukung pengambilan keputusan suatu rumah tangga untuk menerima PKH juga dapat merujuk pada beberapa sistem yang dibuat oleh Aminudin & Sari (2017); Pertiwi et al. (2019); Laisouw et al. (2019); Purba & Sihotang (2019); Pujiyanto, et al. (2020); dan Munawir et al. (2021).



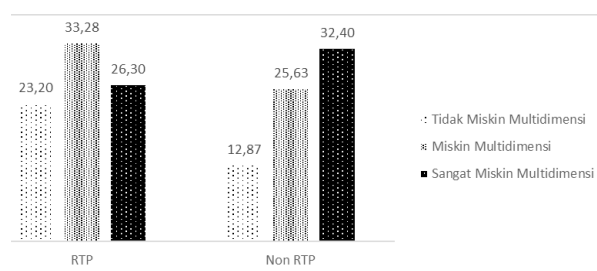
Sumber: Data mentah Susenas KOR Maret 2021 (diolah)

Gambar 6. Persentase Rumah Tangga Pertanian yang Menerima Manfaat PKH berdasarkan Tempat Tinggal, dan Tingkat Kemiskinan Multidimensi, 2021

Bantuan Pangan Non Tunai/Program Sembako

Pada tahun 2021, terdapat 18,8 juta KPM yang menjadi target penerima BPNT/Program Sembako (BPS, 2022b). Namun, penerima program BPNT juga masih belum menunjukkan kondisi yang diharapkan. RTP penerima BPNT masih banyak yang terkategori tidak miskin (Gambar 7). Bahkan data BPS (BPS, 2022b) menunjukkan bahwa penerima BPNT masih ditemukan pada beberapa rumah tangga di desil pengeluaran kelompok atas (D9-D10), walaupun persentasenya kurang dari 10 persen.

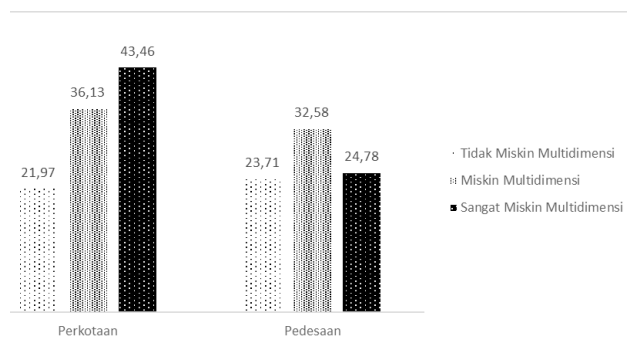
Beberapa penelitian mengkaji keberhasilan program BPNT ini, misalnya Hasimi (2020) yang mengamati keberhasilan dari 6T, yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Dari enam indikator tersebut, menurut kajian Hasimi (2020), yang belum terpenuhi adalah tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat administrasi. Demikian halnya temuan Aisyah et al. (2021) dan Kurniawan (2020) yang menunjukkan bahwa penerima BPNT belum tepat sasaran.



Sumber: Data mentah Susenas KOR Maret 2021 (diolah)

Gambar 7. Persentase Rumah Tangga yang Pernah Menerima BNPT/Program Sembako berdasarkan Kategori Rumah tangga, dan Tingkat Kemiskinan Multidimensi, 2021

Perbandingan pola penerima BPNT di perkotaan dan pedesaan, selaras dengan penerima PKH dan KKS. Persentase RTP penerima BPNT di pedesaan cenderung lebih rendah terutama kategori sangat miskin. Bahkan, persentase RTP penerima BPNT yang tidak miskin dan sangat miskin memiliki nilai yang hampir sama (Gambar 8).



Sumber: Data mentah Susenas KOR Maret 2021 (diolah)

Gambar 8. Persentase Rumah Tangga Pertanian yang Menerima BNPT/Program Sembako berdasarkan Tempat Tinggal, dan Tingkat Keiskinan Multidimensi, 2021

Akurasi penerima BNPT untuk keseluruhan rumah tangga dalam kajian ini adalah 81 persen, sedangkan akurasi RTP penerima BPNT sebesar 76 persen. Ini menunjukkan program perlindungan tersebut sudah cukup baik. Hal ini juga selaras dengan beberapa penelitian seperti Ermawati (2019) yang menghasilkan tingkat akurasi sebesar 98,56 persen, Hermanto & Jaelani (2019) 96 persen, Saputra et al. (2021) 91,54 persen. Namun pada penelitian lain, seperti kajian Ardha et al. (2021) dan Irawan (2019) tingkat akurasi penyaluran BPNT di bawah 45 persen. Boleh jadi perbedaan tersebut karena perbedaan lokus kajian, waktu penelitian, dan metode yang digunakan. Namun, berbagai informasi tersebut dapat memberikan gambaran masih adanya ketidakakuratan penerima BPNT. Oleh sebab itu, maka perlu dilakukan evaluasi prosedur pendataan penerima BPNT, utamanya berkaitan dengan *updating* data (Garis & Desfirani, 2021; Kania, 2022). *Updating* data harus lebih banyak dilakukan di daerah pedesaan karena persentase RTP tidak miskin yang menerima BPNT masih cukup tinggi, hampir sama dengan persentase RTP yang sangat miskin yang menerima bantuan serupa (Gambar 8).

Jika *updating* data sudah dilakukan, selanjutnya dapat mengidentifikasi penerima BPNT dengan sistem informasi dan teknik tertentu seperti yang dilakukan oleh Parhusip (2019); Riyansuni & Devitra (2020); Husaini & Purwidayanta (2019); Hutagalung et al. (2022); Wahyudin (2020); Syah (2021), Hanipah et al. (2020); dan Fuady & Abadi (2017). Sistem informasi atau metode-metode tersebut juga dapat membantu dalam pengambilan keputusan, sehingga rumah tangga miskin dapat teridentifikasi secara cepat dari hasil *updating* data.

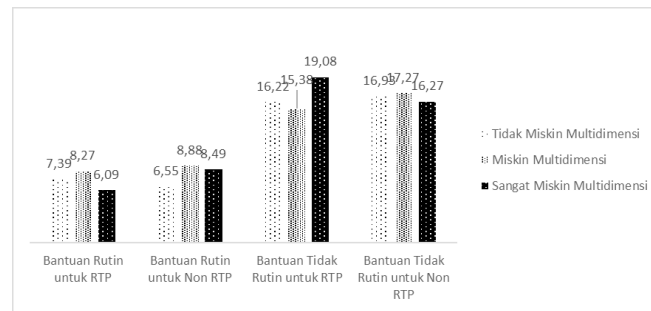
Program Bantuan Pemerintah Daerah

Perlindungan sosial tidak hanya diberikan oleh pemerintah pusat yang bersumber dari APBN, namun juga dapat diberikan oleh pemerintah daerah (pemda). Bantuan sosial dari pemda dapat berupa uang/barang dari pemda kepada individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Sumber dana bantuan pemda berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ataupun dana otonomi khusus (otsus) (BPS, 2021). Bantuan tersebut dapat bersumber dari gubernur, bupati, walikota, camat, atau kepala desa. Dasar dari pemberian bantuan tersebut adalah karena pemda dipersilahkan menyalurkan bansos kepada penerima di luar program Kemensos sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran KPK Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 21 April 2020 tentang Penggunaan DTKS dan Non DTKS dalam Pemberian Bantuan Sosial ke Masyarakat (Ruhana & Ferdiansyah, 2020).

Idealnya semakin tinggi status kemiskinannya, semakin banyak yang memiliki bantuan dari pemda, namun kenyataannya tidak demikian (Gambar 9). Persentase RTP yang menerima bantuan rutin dari pemda justru lebih tinggi pada RTP tidak miskin dibandingkan RTP sangat miskin (7,39 persen dibanding 6,09 persen). Sementara itu, distribusi bantuan tidak rutin terlihat tidak berbeda secara nyata antara RTP tidak miskin dan RTP miskin multidimensi.

Selain pola yang tidak selaras dengan tingkat kemiskinan, Gambar 9 juga menunjukkan adanya indikasi bahwa pemda lebih banyak memberikan bantuan tidak rutin dibandingkan bantuan rutin. Hal ini tentunya disesuaikan dengan kemampuan finansial setiap wilayah. Pada masa pandemi Covid-19, bantuan pemda sangat memberikan manfaat bagi masyarakat, namun pola sebaran penerima bantuan yang relatif acak pada Gambar 9 menggambarkan bahwa distribusi bantuan belum mempertimbangkan kondisi kesejahteraan masyarakatnya dan cenderung tidak terintegrasi. Hal tersebut disebabkan karena sumber anggaran yang berbeda, data penerima bantuan yang tidak

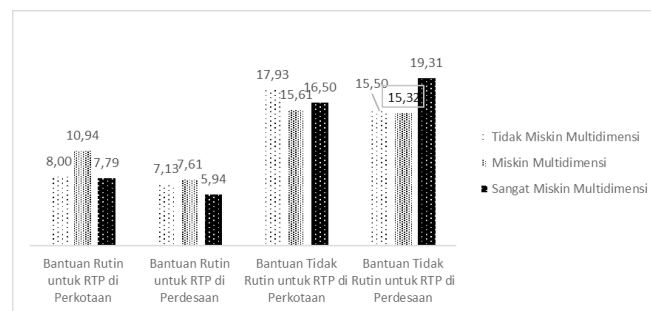
terintegrasi, dan perbedaan sistem penyaluran bantuan sosial (Rahmansyah et al., 2020). Dengan demikian, dapat terjadi duplikasi pemberian bantuan pada satu rumah tangga. Di sisi lain, definisi masyarakat terkena dampak Covid-19 masih rancu (Mufida, 2020), sehingga kriteria penerima bantuan tidak standar.



Sumber: Data mentah Susenas KOR Maret 2021 (diolah).

Gambar 9. Persentase Rumah Tangga berdasarkan Kategori Pertanian/Nonpertanian, Tingkat Kemiskinan Multidimensi dan Perolehan Bantuan Rutin/Tidak Rutin dari Pemda, 2021

Pola lain yang terlihat pada Gambar 9 adalah perbandingan wilayah perkotaan dan pedesaan. Hal tersebut menunjukkan kondisi yang kurang sesuai harapan, terlebih lagi pemberian bantuan tidak rutin di perkotaan. Bantuan tidak rutin termasuk bantuan untuk masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 (BPS, 2021), yang utamanya terjadi di perkotaan. Oleh sebab itu, hal ini juga menyebabkan penerima manfaat bantuan tidak rutin pemda tersebut lebih banyak diberikan pada RTP tidak miskin.



Sumber: Data mentah Susenas KOR Maret 2021 (diolah)

Gambar 10. Persentase Rumah Tangga Pertanian Berdasarkan Wilayah Tempat Tinggal, Tingkat Kemiskinan Multidimensi dan Perolehan Bantuan Rutin/Tidak Rutin dari Pemda, 2021

KESIMPULAN

Rumah tangga pertanian yang miskin dan sangat miskin di Indonesia masih banyak yang belum mendapatkan berbagai program perlindungan sosial. Temuan mengejutkan adalah RTP tidak miskin banyak yang menerima program KKS, PKH, BPNT, bantuan rutin, dan bantuan nonrutin pemda, masing-masing sebesar 15 persen, 18 persen, 23 persen, 7 persen dan 16 persen dari keseluruhan RTP tidak miskin di Indonesia. Padahal dari sisi jumlah, RTP tidak miskin jauh lebih banyak dari RTP miskin dan sangat miskin, dengan porsi 69 persen.

Adanya ketidaktepatan dalam pemberian perlindungan sosial pada RTP di Indonesia juga tercermin dari tingkat akurasi. Tingkat akurasi penerima KKS, PKH, dan BPNT masing-masing sekitar 81 persen, 75 persen dan 74 persen. Tingkat akurasi pemberian perlindungan sosial pada RTP juga cenderung lebih rendah dari keseluruhan rumah tangga untuk semua jenis perlindungan sosial. Temuan ini semakin memperkuat dugaan adanya kelemahan pengelolaan data dan sistem verifikasi data penduduk/rumah tangga miskin di pedesaan, karena RTP mayoritas tinggal di pedesaan.

Dugaan ketidaktepatan dalam pemberian perlindungan sosial pada RTP, khususnya di pedesaan dapat disebabkan oleh kelemahan sistem pendaftaran mandiri baik secara *offline* maupun secara *online*. Masyarakat miskin minim informasi, dan tidak mengetahui bagaimana cara mendaftarkan diri. Terlebih lagi masyarakat miskin di pedesaan pada umumnya tidak melek internet, sehingga mereka yang mendaftar sebagai KPM adalah mereka yang melek internet. Hal ini menyebabkan banyaknya rumah tangga sangat miskin yang tidak terdata, dan banyaknya rumah tangga tidak miskin yang terdata. Oleh sebab itu, disarankan agar aparat pemerintah khususnya di pedesaan lebih aktif membantu masyarakat miskin agar terdaftar sebagai KPM serta melakukan sosialisasi yang inklusif.

Hasil temuan kajian tersebut di atas dapat menjadi masukan bagi DPR RI dalam merumuskan Rancangan Undang-Undang tentang APBN, terutama hal yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan, yaitu agar lebih memprioritaskan RTP atau sektor pertanian sebagai target penerima manfaat bantuan sosial. Bagi Kementerian Sosial, kajian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi pemutakhiran basis data kemiskinan. Tata kelola data penduduk/ rumah tangga miskin agar lebih memperhatikan daerah pedesaan. Diperlukan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat yang memiliki akses informasi yang terbatas terkait dengan prosedur pendaftaran mandiri. Pengawasan proses verifikasi data juga perlu ditingkatkan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya hanya mencakup beberapa jenis perlindungan sosial, maka sebaiknya penelitian selanjutnya dapat menganalisis jenis perlindungan atau bantuan sosial lainnya yang belum dicakup dalam penelitian ini, termasuk bantuan yang dikhususkan untuk RTP, seperti subsidi benih, pupuk, alat dan permesinan pertanian. Selain itu, cakupan rumah tangga yang digunakan penelitian ini hanya pada rumah tangga biasa, sehingga tidak mencakup gelandangan, pengemis, dan rumah tangga lainnya yang termasuk dalam golongan fakir miskin yang dikategorikan Kemensos.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

BPS. (2021). *Konsep dan Definisi Susenas Maret 2021*. Jakarta: BPS.

BPS. (2022a). *Membangun Pertanian Tangguh dan Berkelanjutan Untuk Indonesia Maju*. Jakarta: BPS.

BPS. (2022b). *Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2021*. Jakarta: BPS.

BPS. (2022c). *Keadaan Angkatan Kerja Februari 2022*. Jakarta: BPS.

TNP2K. (2018). *Program Bantuan Pemerintah Untuk Individu, Keluarga, dan Kelompok Tidak Mampu Menuju Bantuan Sosial Terintegrasi*. Jakarta: TNP2K.

Jurnal dan Working Paper

Aidha, C. N., Ningrum, D. R., Armintasari, F., Herawati, H., Ramdlaningrum, H., Ramdlaningrum, M., & Thaariq, W. (2020). *Indeks Kemiskinan Multidimensi Indonesia, 2015–2018*.

Alkire, S., & Jahan, S. (2018). *The New Global MPI 2018: Aligning with the Sustainable Development Goals, HDRO Occasional Paper*, United Nations Development Programme (UNDP).

Alkire, S., Conconi, A., & Seth, S. (2014). *Multidimensional Poverty Index 2014: Brief methodological note and results*.

Alkire, S., Foster, J. E., Seth, S., Emma, M., Roche, J. M., Ballon, P., Bourguignon, F. (2014). *Multidimensional Poverty Measurement and Analysis: Chapter 1 - Introduction*. OPHI Working Paper No.82, 33.

Aisyah, T., Sukmawati, C., Hasyem, M., & Aklima, N. (2021). The Effectiveness of the Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) during the Covid-19 Period in Bireuen Regency. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 2(2), 206-217.

Aminudin, N., & Sari, I. A. P. (2017). Sistem Pendukung Keputusan (Dss) Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (Pkh) Pada Desa Bangun Rejo Kec. Punduh Pidada Pesawaran Dengan Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP). *Jurnal TAM (Technology Acceptance Model)*, 5, 66-72.

Anggleni, A. (2018). Implementasi Kebijakan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 1(1), 24-39.

Beni, S., & Manggu, B. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Perbatasan. *Sosio Konsepsia*, 9(2), 162-170.

Budiantoro, S., Fanggidae, V., Saputra, W., Maftuchan, A., & Artha, D. R. P. (2013). *Multidimensional Poverty Index (MPI): Konsep dan Pengukurannya di Indonesia*. Jakarta: Perkumpulan PRAKARSA.

- Ermawati, E. (2019). Algoritma Klasifikasi C4. 5 Berbasis Particle Swarm Optimization Untuk Prediksi Penerima Bantuan Pangan Non Tunai. *Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi*, 8(3), 513-528.
- Fitriawati, N., Herdiansah, A., & Gunawan, A. (2019). Sistem Informasi Program Keluarga Harapan Studi Kasus Kecamatan Kosambi Tangerang. *JIKA (Jurnal Informatika)*, 3(2), 105-109.
- Fuady, M. R. F., Fuady, M., & Aulia, F. (2021). Kemiskinan Multi Dimensi dan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. *TATALOKA*, 23(4), 575-582.
- Fuady, R. L., & Abadi, A. M. (2017). Penentuan Penerimaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dengan Menggunakan Fuzzy Multiple Attribute Descission Making. *Semin. Mat. Dan Pendidik. Mat*, 203-210.
- Garis, R. R., & Desfirani, L. (2021). Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai dalam Penanganan Dampak Covid-19. *Musamus Journal of Public Administration*, 4(1), 47-56.
- Gopal, P., Abdul Rahman, M. A., Malek, N. M., Jamir Singh, P. S., & Chee Hong, L. (2021). Kemiskinan Adalah Satu Fenomena Multidimensi: Suatu Pemerhatian Awal. *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)*, 6(1), 40 - 51.
- Hanipah, A., Djamaludin, D., & Syam, S. (2020). Sistem Pendukung Keputusan Pengolahan Data Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Warga Miskin Menggunakan Metode Weighted Product (WP) Pada Kelurahan Batusari Kota Tangerang. *Jurnal Ilmiah Fakultas Teknik*, 1(3), 238-246.
- Hasimi, D. M. (2020). Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam. *REVENUE: Jurnal Manajemen Bisnis Islam*, 1(01), 61-72.
- Hendri, H., Komarudin, R., Oscar, D., Salim, A., Afni, N., & Maulana, Y. I. (2022). Implementation of Naive Bayes Method In Classification Of Prospective Kartu Keluarga Sejahtera. *Journal of Information System, Informatics and Computing*, 6(1), 265-272.
- Hermanto, B., & Jaelani, A. (2019). Penerapan Data Mining Untuk Prediksi Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Di Desa Wanacala Menggunakan Metode Naïve Bayes. *Jurnal SIGMA*, 9(4), 64-72.
- Husaini, R. R. N., & Purwidayanta, S. (2019). Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Penerima Bantuan Pangan Non Tunai Dengan Metode Simple Addictive Weighting (SAW). *Jurnal Manajemen dan Teknik Informatika (JUMANTAKA)*, 2(1).
- Hutagalung, J., Nofriansyah, D., & Syahdian, M. A. (2022). Penerimaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Menggunakan Metode ARAS. *JURNAL MEDIA INFORMATIKA BUDIDARMA*, 6(1), 198-207.
- Kania, I. (2022). Evaluation of the Non-Cash Food Assistance Program in Sadang Village, Sucinaraja District, Garut Regency. *International Journal of Demos-IJD*, 4(2).
- Khaliq, A., & Uspri, B. (2017). Kemiskinan Multidimensi Dan Perlindungan Sosial. *Business Management Journal*, 85-191.
- Laisouw, A. R., Lutfi, S., & Tempola, F. (2019). Sistem Pendukung Keputusan Pemberian Bantuan Program Keluarga Harapan (Pkh) Pada Orang Miskin Di Kota Ternate Menggunakan Metode Ahp. *JIKO (Jurnal Informatika dan Komputer)*, 2(1), 34-40.
- Masnan, S., & Nashir, A. (2020). Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Kartu Keluarga Sejahtera. *PILAR*, 11(2), 1-14.
- Mufida, A. (2020). Polemik Pemberian Bantuan Sosial Di Tengah Pandemic Covid 19. *Adalah*, 4(1), 159-166.
- Munawir, M., Susmanto, S., Hidayat, T., Irhamni, I., Zulfan, Z., Shah, T. I., & Fachriana, N. (2021). Penerapan Sistem Informasi Pendataan Penerima Dana Program Keluarga Harapan pada Gampong Beurawe Kecamatan Kuta Alam berbasis Web GIS. *Jurnal Serambi Engineering*, 6(3).
- Parhusip, J. (2019). Penerapan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) Pada Desain Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Calon Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kota Palangka Raya. *Jurnal Teknologi Informasi: Jurnal Keilmuan dan Aplikasi Bidang Teknik Informatika*, 13(2), 18-29.

- Pardede, P. G. R. (2021). Analisis Kemiskinan Multidimensi di Provinsi Papua Pendekatan Structural Equation Modelling (SEM) Tahun 2019. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 20(3), 257-268.
- Pertiwi, I. P., Fedinandus, F. X., & Limantara, A. D. (2019). Sistem Pendukung Keputusan Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Menggunakan Metode Simple Additive Weighting. *CAHAYATECH*, 8(2), 182-195.
- Pujianto, P., Mujito, M., Prabowo, D., & Prasetyo, B. H. (2020). Pemilihan Warga Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Menggunakan Metode Simple Additive Weighting (SAW) dan User Acceptance Testing (UAT). *J. Inform. Univ. Pamulang*, 5(3), 379.
- Purwanto, S. A., Sumartono, S., & Makmur, M. (2013). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Memutus Rantai Kemiskinan (Kajian di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto). *Wacana Journal of Social and Humanity Studies*, 16(2), 79-96.
- Purba, R., & Sihotang, H. T. (2019). Decision Support Systems Recipient Program Keluarga Harapan (PKH) In Durian Kec. Pantai Labu Kab. Deli Serdang with the Simple Additive Weighting (SAW) Method: Decision Support Systems Recipient Program Keluarga Harapan (PKH) In Durian Kec. Pantai Labu Kab. Deli Serdang with the Simple Additive Weighting (SAW) Method. *Jurnal Mantik*, 3(3), 91-98.
- Rahmansyah, W., Qadri, R. A., Sakti, R. R. A., & Ikhsan, S. (2020). Pemetaan permasalahan penyaluran bantuan sosial untuk penanganan Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 2(1), 90-102.
- Riyansuni, I., & Devitra, J. (2020). Analisis Dan Perancangan Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dengan Simple Additive Weighting (SAW) Pada Dinas Sosial Kota Jambi. *Jurnal Manajemen Sistem Informasi*, 5(1), 151-163.
- Roidah, I. S. (2016). Evaluasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Dalam Program Keluarga Harapan di Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung. *Jurnal AGRIBIS*, 12(14), 39-47.
- Ruhyana, N. F., & Ferdiansyah, H. (2020). Strategi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumedang Dalam Penyaluran Bantuan Sosial di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Khazanah Intelektual*, 4(2), 789-804.
- Saputra, R. A., Wasiyanti, S., & Pribadi, D. (2021). Information Gain Pada Algoritma C4. 5 Untuk Klasifikasi Penerimaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). *Indonesian Journal of Business Intelligence (IJUBI)*, 4(1), 25-30.
- Sasmito, C., & Nawangsari, E. R. (2019). Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan di Kota Batu. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 3(2), 68-74.
- Setyani, A. I. & Sugiarto (2021). Aplikasi Metode Geographically Weighted Regression Determinan Kemiskinan Multidimensi Kabupaten/kota di Kawasan Timur Indonesia. *Jurnal Statistika dan Aplikasinya*, 5(2), 121-132.
- Sofianto, A. (2020). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Jawa Tengah. *Sosio Konsepsia*, 10(1), 14-31.
- Suhendra, M. A., Ispriyanti, D., & Sudarno, S. (2020). Ketepatan Klasifikasi Pemberian Kartu Keluarga Sejahtera Di Kota Semarang Menggunakan Metode Regresi Logistik Biner Dan Metode Chaid. *Jurnal Gaussian*, 9(1), 64-74.
- Suleman, S. A., & Resnawaty, R. (2017). *Program Keluarga Harapan (PKH): Antara perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan*. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 88-92.
- Sumargo, B., & Simanjuntak, N. M. (2019). Deprivasi Utama Kemiskinan Multidimensi Antarprovinsi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 19(2), 160-172.
- Usman, C. (2014). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan (Suatu Studi di Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo). *Jurnal Administrasi Publik*, 2(001), 1-13.

Sumber Digital

- Kemensos. (2021). *Apa itu PKH*. Diperoleh tanggal 22 Agustus 2022, dari <https://pkh.kemensos.go.id/?pg=tentangpkh-1>.

- Kemensos. (22 September 2021). Kemensos Lanjutkan Perlindungan Sosial untuk Masyarakat Terdampak Pandemi Melalui Program Bansos. Diperoleh tanggal 22 Agustus 2022, dari <https://kemensos.go.id/kemensos-lanjutkan-perlindungan-sosial-untuk-masyarakat-terdampak-pandemi-melalui-program-bansos>.
- Widiyani, R. (4 Maret 2021). *Syarat dan Cara Daftar Kartu Keluarga Sejahtera KKS Online serta Offline*. Diperoleh tanggal 24 Agustus 2022, dari <https://news.detik.com/berita/d-5481029/syarat-dan-cara-daftar-kartu-keluarga-sejahtera-kks-online-serta-offline>
- Wisnubroto, K (28 Februari, 2021). *Data Terintegrasi, Bansos Lebih Tepat Sasaran*. Diperoleh tanggal 24 Agustus 2022, dari <https://www.indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/2552/data-terintegrasi-bansos-lebih-tepat-sasaran?lang=1?lang=1?lang=1?lang=1?lang=1?lang=1?lang=1?lang=1>.

Sumber Lainnya

- Ardha, A. L., Wildayana, E., & Bidarti, A. (2021). *Analisis Distribusi Bantuan Bahan Pangan Non Tunai (Bpnt) Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 Pada Petani Padi Di Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir* (Doctoral dissertation, Sriwijaya University).
- Arifin, F. A. M. (2020). *Analisis Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Kartu Keluarga Sejahtera (Kks) Di Kelurahan Landasan Ulin Timur* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).
- Framita, D. Y. (2017). *Implementasi Program Kartu Keluarga Sejahtera dalam Usaha Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Gunung Tinggi Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang*.
- Irawan, A. (2019). *Decision Support System Aplikasi Penerimaan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) Menggunakan Metode Weight Product* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Jember).
- Isdijoso, W., Suryahadi, A., & Akhmadi, A. (2016). *Penetapan Kriteria dan Variabel Pendataan Penduduk Miskin yang Komprehensif dalam Rangka Perlindungan Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota*. Kota, Kertas Kerja SMERU, The SMERU Research Institute.
- Kholif, K. I. (2014). *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Kurniawan, A. A. (2020). *Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo* (Doctoral dissertation, Universitas 17 Agustus 1945).
- Rastantra, V. A., & Mulia, I. A. (2019). *Kemiskinan Multidimensi Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2017*.
- Raydzika, R. C. (2021). *Analisis Implementasi Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Kelurahan Arcawinangun Kecamatan Purwokerto Timur* (Doctoral dissertation, Universitas Jenderal Soedirman).
- Rizal, M. (2018). *Pengaruh Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Syah, F. M. D. (2021). *Penerapan Algoritma Support Vector Machine Untuk Klasifikasi Penerima Bantuan Pangan Non Tunai* (Doctoral dissertation, Universitas Yudharta).
- Utomo, D., Hakim, A., dan Ribawanto, H. (2014). *Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin (Studi Pada Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri)* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Virgoreta, D. A. (2014). *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Beji Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban Jawa Timur)* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Wahyudin, W. (2020). *Klasterisasi Data Keluarga Penerima Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Mekar Jaya Menggunakan Algoritma K-means* (Doctoral dissertation, Universitas Dinamika Bangsa).